Journal of Regional Economics and Development, Volume 1, Number 3, 2024, *Page: 1-9*

Peran APBN dalam Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah di Indonesia

Cindy Amelia Putri, Erfani Fitri Noviantini*, Farhah Najla Ramadhani, Arif Fadilla

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada menganalisis penggunaan APBN pasca pandemi Covid-19 untuk membenahi infrastruktur dan masalah yang berkaitan dengan dampak dari fenomena pasca pandemi. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menginterpretasi data APBN 2023 dengan data outlook APBN di tahun 2022 dalam mengalokasikan anggarannya dalam meningkatkan infrastruktur dan pembangunan wilayah. Metode yang diterapkan adalah kombinasi dari data kuantitatif dengan data kualitatif. Hasil yang diperoleh berupa perubahan fokus penggunaan APBN untuk pembenahan dan peningkatan infrastruktur dengan menargetkan pada pertumbuhan ekonomi dalam bidang pariwisata, transportasi dan industri, serta memberikan manfaat untuk ekonomi negara dan dampak penurunan indeks kemahalan logistik. Pengalokasian APBN dapat berperan dalam peningkatan dan pembangunan wilayah namun juga sangat bergantung pada perencanaan yang cermat dan efektif; partisipasi dan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan pengendalian dan pengawasan yang handal.
Kata kunci: APBN; Pembangunan Wilayah; Infrastruktur

*Correspondence: Erfani Fitri Noviantini
Email: erfanifitrinoviantini@gmail.com

Received: 25 Feb 2024
Accepted: 13 May 2024
Published: 14 May 2024

Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *This research focuses on analyzing the use of the state budget after the Covid-19 pandemic to improve infrastructure and problems related to the impact of the post-pandemic phenomenon. The research objective is to interpret the 2023 state budget data with the 2022 state budget outlook data in allocating its budget in improving infrastructure and regional development. The method applied is a combination of quantitative data with qualitative data. The results obtained are in the form of a change in the focus of using the state budget to revamp and improve infrastructure by targeting economic growth in tourism, transportation and industry, as well as providing benefits to the country's economy and the impact of reducing the logistics cost index. State budget allocations can play a role in regional improvement and development but are also highly dependent on careful and effective planning; government, private, and community participation and collaboration; and reliable control and supervision.*
Keywords: *State Budget; Regional Development; infrastructure*

Pendahuluan

Infrastruktur merupakan fondasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi kota, dengan komponen seperti jaringan transportasi, pasokan energi, sistem air dan sanitasi, serta teknologi informasi yang menjadikan kota berfungsi dengan baik (Azwardi dan Sukanto, 2014). Infrastruktur yang memadai dan efisien tidak hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan ekonomi, namun juga merupakan katalisator yang mempunyai dampak luas. Infrastruktur berkualitas tinggi membantu meningkatkan produktivitas di sektor ekonomi utama seperti perdagangan, manufaktur, dan jasa. Jaringan transportasi

yang baik memungkinkan kelancaran pergerakan barang dan manusia, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing usaha lokal. Energi yang stabil dan terjangkau merupakan prasyarat mutlak bagi industri dan industri modern, sekaligus memastikan air bersih dan sanitasi yang memadai mendukung kesejahteraan sosial dan mencegah penyakit (Imelda, 2013). Pada saat yang sama, teknologi informasi yang canggih memfasilitasi konektivitas global dan memungkinkan inovasi di berbagai sektor.

Infrastruktur yang tidak memadai mengurangi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Infrastruktur diakui secara luas sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mendorong pengurangan kesenjangan dan kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang (Tusk Advisory, 2018). Indonesia dinilai rendah dibandingkan negara lain karena dalam hal kualitas infrastruktur dan pembangunan infrastruktur tidak memadai dan menjadi hambatan bagi beberapa perusahaan untuk beroperasi dan berinvestasi. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah berkomitmen menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritasnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Subandi (2014), pembangunan ekonomi adalah pengembangan kegiatan atau aktivitas ekonomi di suatu wilayah atau negara yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup/kesejahteraan (pendapatan per kapita) penduduk di wilayah atau negara tersebut dalam jangka panjang. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi, yang diikuti dengan penghapusan kesenjangan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pendidikan yang berkualitas, peningkatan standar kesehatan dan gizi, perbaikan kondisi lingkungan hidup dan penciptaan kesempatan yang sama untuk pembangunan dan kesehatan lebih lanjut (Amalia, 2007). Pembangunan ekonomi nasional ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk, serta pemerataan wilayah. Perbedaan pertumbuhan ekonomi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain di Indonesia akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan, dan pembangunan ekonomi akan terhambat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN memuat daftar rencana pendapatan dan belanja negara secara sistematis dan rinci pada tahun anggaran (periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember). Tujuan pembentukan APBN adalah untuk menjamin terciptanya keseimbangan dinamis dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, yang pada akhirnya mencapai peningkatan output, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan produktivitas relatif. Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk meningkatkan infrastruktur dan pembangunan wilayah di Indonesia adalah dengan menggunakan dana APBN. Dana tersebut nanti dialirkan ke setiap daerah yang ada di Indonesia dan diserahkan kepada pemerintah disana dan digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan pembangunan di daerah tersebut.

Dalam konteks ini, penelitian terhadap APBN penting dilakukan guna mengetahui

apakah dana yang didapat telah teralokasikan dengan baik dan benar sesuai dengan rencana penggunaan APBN dan untuk mengetahui apakah APBN dapat berperan besar dalam meningkatkan infrastruktur dan pembangunan wilayah di Indonesia.

Metode Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode campuran dengan menggabungkan data kualitatif dan data kuantitatif untuk menunjang penelitian agar dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan data yang di teliti dapat tervalidasi dengan baik serta dapat menjelaskan secara rinci bagaimana pengolahan dana APBN Indonesia yang didapat pada tahun 2023.

Adapun sumber data yang kami ambil berasal dari Jurnal terindeks SINTA 4, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Keuangan, serta dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan literatur yang relevan dengan judul dan referensi penelitian ini. Selain itu, dalam menganalisis data APBN, digunakan metode analisis statistik untuk dapat menginterpretasi data agar lebih mudah dipahami.

Dengan menggunakan metode campuran (menggabungkan data kualitatif dan data kuantitatif), sumber data sekunder, dan metode analisis statistik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran APBN dalam meningkatkan infrastruktur dan pembangunan wilayah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengetahuan untuk masyarakat agar mengetahui bagaimana dana APBN 2023 di Indonesia di salurkan di tiap-tiap daerah dan bagaimana pengelolaannya.

Hasil dan Pembahasan

Di tengah dampak perubahan iklim global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 berperan penting dalam menjamin stabilitas upaya mitigasi dampak krisis ekonomi global. APBN tahun 2023 yang dilaksanakan dan dikelola dengan baik disertai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi APBN untuk mencapai target pertumbuhan tahun 2024. Berkat kerja keras APBN, perekonomian Tanah Air mampu tumbuh sebesar 5,05% pada tahun 2023 (Q1-Q3) dengan menjaga, mengendalikan, dan menurunkan inflasi sepanjang tahun.

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 - 2023 (triliun rupiah)

Uraian	APBN 2022	APBN 2023
A. PENDAPATAN NEGARA	1.846,1	2.463,0
PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.845,6	2.462,6
Peneriamaan Perpajakan	1.510,0	2.021,2
Penerimaan Negara Bukan Pajak	335,6	441,4
PENERIMAAN HIBAH	0,6	0,4
B. BELANJA NEGARA	2.714,2	3.061,2
BELANJA PEMERINTAHAN PUSAT	1.944,5	2.246,5
Belanja K/L	945,8	1.000,8
Belanja non-K/L	998,8	1.245,6
TRANSFER KE DAERAH	769,6	814,7
KESEIMBANGAN PRIMER	(462,2)	(156,8)
SURPLUS/(DEFISIT)	(868,0)	(598,2)
%thd PDB	*(4,85)*	*(2,54)*
PEMBAYARAN ANGGARAN	868,0	598,2

(Sumber: Kemenkeu, 2023)

Pendapatan negara pada APBN 2023 sebesar Rp2.463,0 triliun, meningkat 1,1% dibandingkan tahun 2022, hal ini karena didukung oleh dorongan untuk meningkatkan pendapatan negara demi keberhasilan pelaksanaan reformasi perpajakan. Pada penerimaan perpajakan juga meningkat 5,0% dari tahun 2022 dengan seiringnya pertumbuhan kegiatan perekonomian dalam negeri serta pelaksanaan reformasi perpajakan. Sementara itu, PNBP menurun 13,6% dari tahun 2022 karena kenaikan harga komoditas.

Belanja negara pada APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun, turun 3,4% dari outlook 2022. Kuota transfer ke daerah meningkat sebesar Rp 15,6 triliun atau 2,0% dibandingkan tahun 2022. Kuota belanja pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar 5,2% dibandingkan tahun 2022, hal ini terkait dengan membaiknya kuaitas belanja. Salah satu program belanja pemerintah pusat yaitu pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp391.7 triliun.

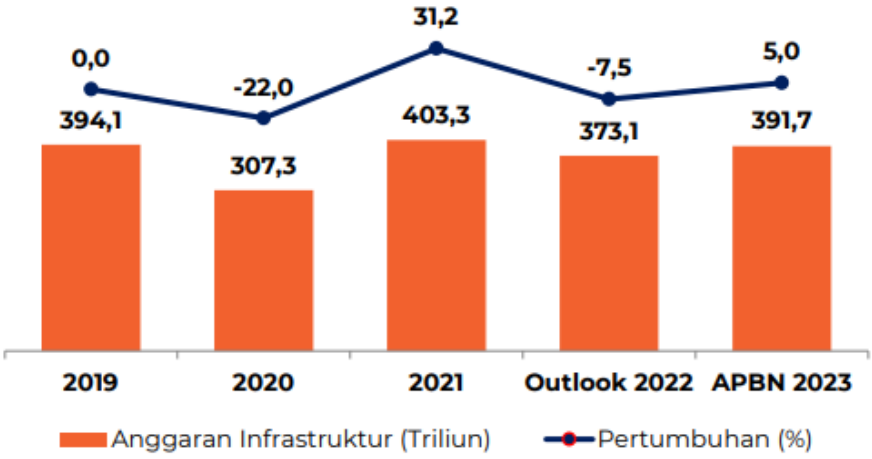

Gambar 1 Anggaran Infrastruktur 2019-2023

(Sumber : Kemenkeu, 2023)

Percepatan dan perluasan pembangunan di Indonesia telah menjadi fokus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, khususnya untuk menjaga laju pertumbuhan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pemanfaatan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pendanaan pembangunan infrastruktur difokuskan pada proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi pasca wabah Covid-19 di bidang pariwisata, transportasi dan industri, bermanfaat bagi perekonomian negara dan berdampak pada penurunan indeks kemahalan logistik.

Anggaran Infrastruktur tahun 2023 bertujuan untuk mendukung pesatnya pembangunan infrastruktur pendorong transformasi ekonomi dan juga pertumbuhan baru, serta menetapkan arah kebijakan yaitu: (1) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk melengkapi layanan dasar; (2) melakukan pemerataan akses terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendorong kegiatan ekonomi; (3) membangunan infrastruktur sebagai pendorong perubahan ekonomi (energi, makanan, konektivitas, dan kendaraan); (4) mendukung pelaksanaan Proyek Straregis Nasional (PSN) dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan, dengan tujuan mentransformasikan peran Pusat Administrasi Kepulauan (OIKN) agar dapat beroperasi secara mandiri sejak tahun 2023; (5) meningkatkan kerja sama kementrian/lembaga, pusat dan daerah, serta pelaksanaan program pembiayaan KPBU.

Secara lebih detail, dari pendanaan tersebut digunakan untuk membangun rumah sebanyak 8.741 unit, yang terdiri dari rumah susun sebanyak 5.379 unit, dan rumah khusus sebanyak 3.362 unit. Dengan anggaran ini pemerintah juga melakukan pembangun atau rehabilitasi sapras pendidikan (dasar dan menengah) sebanyak 801 unit sekolah. Pembangunan SPAM (Sitem Penyediaan Air Minum) dengan muatan 2.313,6 liter per detik. (Kemenkeu, 2023).

Untuk bagian infrastruktur konektivitas, pemerintah pada 2023 melakukan pembangunan 522 Km jalan baru, jalan bebas hambatan 49 KM, dan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). Selain itu, juga membangun 13.684 meter (m) jembatan baru, 2.259 m

underpass/flyover/terowongan. Dan diperuntukan untuk membangun bandara baru di 6 lokasi, serta membangun sepanjang 6.627 km'sp rel kereta api. (Kemenkeu, 2023).

Untuk infrastruktur bidang energi dan pangan, pemerintah membangun pipa transmisi gas bumi Cirebon sampai Semarang tahap 1 (ruas Semarang sampai Batang) sepanjang 62,4 km. Pembangunan jaingan irigasi 6.900 Ha dan rehabilitasi jaringan irigasi 98.700 Ha. Pemerintah juga membangun bendungan baru sebanyak 7 unit serta membangun PLTS Terpadu di wilayah 3T sebanyak 12 unit. (Kemenkeu, 2023).

Untuk infrastruktur TIK, Pemerintah menyediakan BTS/Lastmile di 332 lokasi berbeda dan menyediakan di 9.755 lokasi akses internet baru serta menambahkan daya muat satelit sebesar 8 Gbps. (Kemenkeu, 2023).

Dengan mengalokasikan anggaran yang tepat dan efektif, APBN dapat membantu meningkatkan kualitas infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan fasilitas lainnya. Hal ini, dapat meningkatkan kapasitas kawasan dalam menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Selain itu, APBN juga dapat membantu meningkatkan investasi dan daya saing pembangunan melalui pengembangan sumber daya manusia seperti pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan infrastruktur energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan. Dengan demikian, APBN dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing di era globalisasi.

Namun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari program APBN dalam meningkatkan infrastruktur dan pengembangan wilayah, antara lain (1) Perencanaan yang cermat dan efektif dalam pencairan dana APBN sangat penting untuk mencapai tujuan infrastruktur yang diinginkan; (2) Partisipasi aktif pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana APBN; (3) Kemampuan pengendalian dan pengawasan yang baik juga penting untuk mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi.

Jika dana APBN yang disalurkan ke daerah-daerah yang ada di Indonesia dapat digunakan dengan maksimal dan efisien guna menunjang peningkatan infrastruktur dan pembangunan wilayah, tentu saja keadaan ekonomi di Indonesia akan meningkat pesat. Seperti yang sudah dijelaskan pada pendahuluan bahwa peningkatan infrastruktur dan pembangunan wilayah juga berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Jika pembangunan ekonomi di Indonesia berjalan dengan baik, tentunya rakyat Indonesia akan menjadi makmur dan sejahtera, tidak akan ada lagi kenaikan kemiskinan dan angka pengangguran.

Maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan infrastruktur dan pembangunan wilayah di Indonesia ini sangatlah penting karena dapat menyelesaikan hampir sebagian besar masalah yang ada pada Negara berkembang seperti Indonesia. Dan bukan hal yang mustahil dengan hal tersebut Indonesia akan bisa menjadi negara maju. Maka dari itu, peran APBN pada hal ini sangatlah penting. APBN harus bisa terlaksana dengan baik dan benar serta harus benar-benar tersalurkan dengan efisien sehingga apa yang sudah diagendakan akan benar-benar terbangun di keadaan yang sebenarnya karena kebanyakan kasus yang menghambat pembangunan dengan dana APBN adalah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan menyimpang, membuat dana APBN menjadi

tidak efektif dalam meningkatkan infrastruktur dan membangun wilayah di Indonesia.

Simpulan

APBN tahun 2023 mengalami penyesuaian karena difokuskan untuk usaha pembenahan pasca pandemi pada berbagai sektor yang sebelumnya terdampak secara signifikan dari menyebarnya Covid-19, kemudian diarahkan dalam melakukan dorongan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, sentra pertumbuhan baru, dan menetapkan arah kebijakan. Hasil penelitian yang dilakukan, kami menyimpulkan bahwa pengalokasian dana APBN sudah cukup baik walaupun memang kebanyakan lebih berfokus pada pembangunan IKN. Pada data yang kami dapat juga tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pembangunan di daerah lain yang berasal dari pulau non Sumatera, Jawa, dan Kalimantan seperti Bangka Belitung, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Papua, dan daerah terpencil lainnya. Padahal, daerah seperti itulah yang seharusnya menjadi target utama untuk meningkatkan infrastruktur dan pembangunan wilayah karena mirisnya di daerah terpencil akses jalan tiap wilayah masih ditemukan tidak layak, sanitasi air bersih juga masih kurang, angka pengangguran dan tidak meratanya fasilitas umum juga masih menjadi masalah besar.

Maka dari itu, untuk membuat perekonomian Indonesia menjadi maju terutama dalam infrastruktur dan pembangunan wilayah, dibutuhkan kontribusi yang bereksinambungan antar pemerintahan setiap wilayah yang berada di Indonesia. Pemerintah pusat juga seharusnya memperhatikan keadaan daerah terpencil yang masih banyak kekurangan dalam hal pembangunan.

Pengalokasian APBN dapat berperan dalam peningkatan dan pembangunan wilayah namun juga sangat bergantung pada perencanaan yang cermat dan efektif; partisipasi dan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan pengendalian dan pengawasan yang handal. Dalam penggunaan APBN untuk tahun berikutnya harus dengan melakukan kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta dan Pemerintah untuk memperoleh perencanaan yang tepat sasaran.

Daftar Pustaka

Angelina, D., & Wahyuni, K. T. (2021, November). Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2015-2019. In *Seminar Nasional Official Statistics* (Vol. 2021, No. 1, pp. 733-742).

Darma, S. P., Haliza, N., Ginting, D. A. B. & Kemala, P. (2024). Analisis Efisiensi dan Transparansi APBN Indonesia : Studi Kasus Tahun Terbaru. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. 5(4), 2506-2512.

Fajri, L. M. N. (2017). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan*

Administrasi Publik), *1*(1), 11-22.

Ilmia, A. (2020). Sukuk Negara Dan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, *1*(2), 22-34.

Kamalina, A. R. (2023). Anggaran Infrastruktur 2023 Rp392 Triliun, Ini Pesan Sri Mulyani. https://m.bisnis.com/amp/read/20230123/10/1620664/anggaran-infrastruktur-2023-rp392-triliun-ini-pesan-sri-mulyani.

Kurniawan, E., & Jiwandaningtyas, M. E. (2024). Siaran Pers: Kinerja Positif APBN 2023 Tetap Menjaga Momentum Pemulihan serta Memperbaiki Pemerataan dan Kesejahteraan. Direktorat Jendral Anggaran. https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/siaran-pers:-kinerja-positif-apbn-2023-tetap-menjaga-momentum-pemulihan-serta-memperbaiki-pemerataan-dan-kesejahteraan.

Lestari, N. N. S. A., Bagia, I. W. & Jana, G. P. A. S. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Bisma*: Jurnal Manajemen*. 4(1), 24-33.

Lestari, S. T & Hutagaol, H. D. (2023). Analisis Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Al Manhaj: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. 5(1), 755-772.

Lona, S. S., Perseveranda, M. E & Manafe, H. A. (2023). Analisis Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja. Owner: Riset & *Jurnal Akuntansi*. 7(1), 879-889.

Mardiana, M., Militina, T., & Utary, A. R. (2017). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, *13*(1), 50-60.

Mulyawan, W. & Alia, W. (2020). APBN dan Pendapatan Nasional. Salam: *Islamic Economics Journal.* 1(2), 59-67.

NAZRIANTI, I., RODHITUBILLAH, P., & LESTARI, S. KEGIATAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH SELALU MENINGKAT DAMPAK BAGI APBN.

Nugroho, G. A. (2016). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Indonesian Treasury Review. 1(1), 39-50.

Nuraini & Iskandar. (2019). Pengaruh Infrastruktur Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*. 3(1), 57-64.

Panjaitan, H. A. M., Mulatsih, S. & Rindayati, W. (2019). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43-61.

Rahmawati, H. (2022). Analisis Fungsi Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal STEI Ekonomi* (JEMI). 31(2), 77-82.

Rohim, H. A. A. (2024). Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

https://setneg.go.id/baca/index/pembangunan_infrastruktur_dorong_pertumbuhan_ekonomi_indonesia.

Wardhana, W., Sanggrama, N., Tua, A. P. V., Ardhany, R. & Iksanuddin, A. (2019). Analisis Dampak Ekonomi Investasi Infrastruktur: Pendekatan Model Komputasi Keseimbangan Umum. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*. 1(2), 130-142.

Wibowo, H., Mulya, I. T. & Mujiwardhani, A. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*. 1(2), 164-178.

Yesnat, O., & Syathi, P. B. (2022). Analisis Model Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, *7*(1), 45-58.